

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprita, Serlika, and Yonani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arief, Barda N. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Kaligis, O. C. 2015. *Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam Tugas Kedinasan (Pasca UU No. 30 Tahun 2014)*. Bandung: Penerbit P.T Alumni Bandung.
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press. <http://eprints.upnyk.ac.id/24095/1/Penelitian%20Kualitatif%20Eko%20mUrdiyanto.pdf>.
- Nasir, Ridlwan. 2006. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Surabaya: IAIN Press & LKiS.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Rochaeti, Nur, and Irma Cahyaningtyas. 2019. *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Sudarto. 2007. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tanya, Bernard L., and Yoan N. Simanjuntak. 2010. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, Bernard L., and Yoan N. Simanjuntak. 2010. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- Aester, Lalola, Kurnia Ramadhan, and Diky Anandya. 2022. "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Ringkasan Penelitian Indonesian Corruption Watch*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Ringkasan%20Penelitian_Urgensi%20Pengaturan%20Sita%20Jaminan%20dalam%20Penanganan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf.
- Aester, Lalola, Kurnia Ramadhana, and Diky Anandya. 2022. "Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Laporan Penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW)*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Penelitian%20Urgensi%20Pengaturan%20Sita%20Jaminan%20dalam%20Penanganan%20Perkara%20Tindak%20Pidana%20Korupsi.pdf>.
- Ali, Mahrus. 2018. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 25, no. 1 (Januari): 137 - 158. <https://media.neliti.com/media/publications/260843-none-21d4a553.pdf>.
- Ansori, Lutfil. 2017. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* Vol. 4, no. 2 (Desember).

- <https://media.neliti.com/media/publications/282166-reformasi-penegakan-hukum-perspektif-huk-068a307f.pdf>.
- Ardisasmita, M. S. 2006. "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan, dan Akuntabel." *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Agustus). <https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf>.
- Astuti, Puji. 2013. "Kendala Sistemik Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 2, no. 1 (Mei). <https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.5-17>.
- Auli, Renata C. 2022. "Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2012. "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset." *Laporan Akhir Penelitian BPHN*. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_perampasan_aset.pdf.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, no. No. 1 (April): Hal. 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Fakhrudin. 2020. "Perspektif Budaya Hukum dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia." *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 1, no. 1 (Maret). <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=dhar masisya>.
- Ginting, Yuni P. 2021. "Pemberantasan Pencucian Uang Dengan Pendekatan Follow the Money Dan Follow the Suspect." *Mulawarman Law Review* Vol. 6, no. 2 (Desember): 105-114. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i2.442>.
- Haryanti, Tuti. 2014. "Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Tahkim* Vol. X, no. No. 2 (Desember): Hal. 160-168. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/57/pdf>.
- Hidayat, Maskur. 2015. "Pembaharuan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan." *Jurnal Yuridika* Vol. 30, no. No. 3 (September). 10.20473/ydk.v30i3.1953.
- Ifrani. 2017. "Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa." *Jurnal Al-Adl* Vol. IX, no. No. 3 (Desember). <https://media.neliti.com/media/publications/225072-tindak-pidana-korupsi-sebagai-kejahatan-d20073e1.pdf>.
- Kenedi, John. 2017. "Kebijakan Kriminal dalam Negara Hukum Indonesia : Upaya Mensejahterakan Masyarakat." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 2 (No. 1). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/1026/889>.
- Kulsum, Ummi. 2008. "Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)." *Skripsi Ilmu Hubungan*

- Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.*
<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/13836/gdl%20%2812%29xx.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mahardika, Muhammad D. 2020. "Tinjauan Penerapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Jurist-diction* Vol. 3, no. No. 2 (Maret): 499-518. <https://e-journal.unair.ac.id/JD>.
- Mainur, Rival A. 2016. "Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia." *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.*
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9042>.
- Matompo, Oskar S. 2014. "Pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal Media Hukum* Vol. 21, no. 1 (Juli).
<https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf>.
- Qamrul, Zoyaa R. 2015. "Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi." *Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.*
<http://repository.untag-sby.ac.id/9149/4/Bab%20II.pdf>.
- Qobilli, M. Z. 2019. "Jarimah Zina sebagai Alternatif Pencegahan Perzinahan di Indonesia dalam Perspektif Muqasid Jasser Auda." *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.*
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/15721>.
- Rorong, Yolan D. 2018. "Kajian Hukum tentang Sita Jaminan terhadap Barang Milik Tergugat dengan Memperhatikan SEMA No. 2 Tahun 1962." *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI, no. No. 1 (Januari-Maret): Hal. 69-76.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19437/18987>.
- Sari, Indah. 2020. "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vo. 11, no. 1 (September).
<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Simamora, Reimon, and Putu G. Yasa. 2022. "Konsep Sita Jaminan terhadap Benda Milik Pelaku Tindak Pidana Korupsi: Bagaimana efektivitas Penerapannya?" *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10 (No. 8).
<https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i08.p04>.
- Sina, La. 2008. "Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26, no. No. 1 (Januari).
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1108>.
- Sujayadi, and Yuniarti. 2010. "Pelaksanaan Sita Jaminan dalam Hukum Acara Arbitrase." *Yuridika* Vol. 25, no. No. 3 (September–Desember): Hal. 227-244. <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/255/pdf/18300>.
- Sumantri. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Militer terhadap Anggota TNI Penyalahguna Narkotika di Wilayah Pengadilan Militer II Yogyakarta." *Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Mei).*
<http://hdl.handle.net/123456789/17788>.
- Suyahman. 2009. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan." *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro,*
<http://eprints.undip.ac.id/17810/1/SUYAHMAN.pdf>.

Usman, Endang. 2016. "Penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam upaya mewujudkan pengembalian aset perolehan hasil tindak pidana korupsi." *Disertasi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/54840/Penerapan-sita-jaminan-conservatoir-beslag-dalam-upaya-mewujudkan-pengembalian-aset-perolehan-hasil-tindak-pidana-korupsi>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herzien Inlandsch Reglement
Recht Reglement voor de Buitengewesten
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003
Putusan Pengadilan Nomor 430/K/Pid.Sus/2018

Website/Internet

Abdi, Alfian P. 2022. "Upayakan Sita Jaminan Aset Koruptor demi Pemulihan Kerugian Negara." *Tirto.ID*. <https://tirto.id/upayakan-sita-jaminan-aset-koruptor-demi-pemulihan-kerugian-negara-gqnT>.
Annur, Cindy M. 2022. "Pidana Uang Pengganti Korupsi Hanya 2% dari Kerugian Negara." *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/pidana-uang-pengganti-korupsi-hanya-2-dari-kerugian-negara>.
Hukumonline. 2013. "Pro Kontra Sita Jaminan untuk Perkara Korupsi." *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sita-jaminan-untuk-perkara-korupsi-lt51dea55f2d06d>.
Kementerian Pendidikan. n.d. "kebijakan." *KBBI Daring*. Diakses pada 3 November 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>.

- The Law Dictionary. n.d. "CORRUPTION Definition & Meaning." Black's Law Dictionary. Diakses pada 22 November 2022. <https://thelawdictionary.org/corruption/>.
- Oktavira, Bernadetha A. 2020. "Mengenal Berbagai Jenis Sita dalam Hukum Acara Perdata - Klinik Hukumonline." Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata-lt5efecaabbaf83>.
- Ramadhan, Kurnia. 2022. "Pentingnya Penerapan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Korupsi." Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-penerapan-sita-jaminan-dalam-penanganan-perkara-korupsi-lt62bc0a4c1abb9?page=2>.
- Ramadhani, Mutia. 2012. "Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa." Republika. <https://www.republika.co.id/berita/lztpqj/inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>.
- Transparency International. 2021. "Corruption Perceptions Index." Transparency International. https://www.transparency.org/en/cpi/2021?gclid=Cj0KCQjw4omaBhDqARIsADXULuXC4gNjzUg-6rrs8Tw_iEAeDuU39kL7ZJ_BnAk3D5_NfamR0v7lsbEaAmFcEALw_wc.